

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Teori-teori yang Terkait Judul

Untuk bisa meneliti tentang Partisipasi Politik Komunitas Perempuan Pekerja Pabrik di Kecamatan Mayong pada Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara, maka dibutuhkan teori-teori yang sesuai dengan judul penelitian sehingga bisa membantu peneliti dalam merumuskan suatu kajian masalah.

#### 1. Partisipasi Politik

Secara etimologi, kata partisipasi berasal dari bahasa Latin “*pars*” yang berarti bagian dan “*capere*” yang berarti mengambil. Jika keduanya digabungkan berarti “mengambil.” Dalam bahasa Inggris, partisipasi atau “*participation*” berarti mengambil peran. Dengan demikian, kita dapat mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan atau pengambilan peran dalam kegiatan atau peristiwa politik negara.<sup>1</sup>

Partisipasi politik termasuk bagian penting dari demokrasi. Demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa yang paling mengetahui apa yang baik bagi dirinya adalah dirinya itu sendiri. Sebab keputusan politik yang telah dibuat dan dikerjakan oleh pemerintah mempengaruhi serta menyangkut kehidupan warga negara, maka anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan memutuskan isi keputusan politik tersebut. Oleh karena itu partisipasi politik berarti partisipasi masyarakat dalam menentukan dan memilih pemimpin.<sup>2</sup>

#### 2. Motif Partisipasi Politik

Ada beberapa faktor yang meningkatkan dan menghambat partisipasi politik. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan motif orang-orang yang berhubungan dengannya. Menurut Milbrath mengidentifikasi empat faktor utama yang

---

<sup>1</sup> Sondakh Gideon Repi, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (Studi Di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa),” *Jurnal Politico* 5, no. 1 (2016): 3–4.

<sup>2</sup> Muhammad Abdus Salim, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau),” *UIN Antasari Banjarmasin* (UIN Antasari Banjarmasin, 2014), 10.

memotivasi seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, antara lain:<sup>3</sup>

- a. Sejauh mana seseorang dalam menerima insentif politik
 

Karena bersifat perangsang, membuat seseorang berkeinginan untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Hal ini, minat partisipasi seringkali dipengaruhi oleh partisipasi dalam diskusi politik, baik secara diskusi resmi maupun media.
- b. Karakteristik pribadi seseorang
 

Masyarakat yang memiliki watak sosial sangat peduli terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, dan biasanya bersedia berpartisipasi dalam kegiatan politik.
- c. Karakteristik sosial seseorang
 

Karakteristik sosial mengacu pada status kelompok agama seseorang, etnis, ras, dan sosial ekonomi. Selain itu, karakteristik sosial juga berpengaruh pada perilaku, sikap, dan persepsi seseorang dalam bidang politik. masyarakat yang berasal dari lingkungan sosial akan lebih rasional, keterbukaan, keadilan, dan kejujuran tentunya berkeinginan untuk memperjuangkan nilai tersebut pada bidang politik. Oleh karena itu mereka ingin berpartisipasi dalam bidang politik.
- d. Keadaan politik
 

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam politik biasanya karena adanya lingkungan politik yang kondusif dan demokratis. Lingkungan politik yang kondusif dan demokratis membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan bebas untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dibandingkan dalam dunia politik yang totaliter. Dunia politik seringkali penuh dengan kebrutalan dan kekerasan, sehingga menyebabkan masyarakat menjauh dari kegiatan politik.

Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat partisipasi politik. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik, antara lain:

---

<sup>3</sup> Agung Satya Putrajati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Sendangmulyo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

- a. Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah  
 Organisasi yang dianggap sebagai elit politik dalam organisasi masyarakat atau seorang pemilih akan selalu mengubah kebijakan partisipasi yang telah ada dengan kebijakan partisipasi yang baru berdasarkan dengan situasi dan keadaan.
- b. Pemilih Pemula yang Otonom  
 Pemilih pemula yang otonom cenderung kurang bermotivasi dalam aktivitas politik dan pemilih pemula ini mempunyai ikatan dengan organisasi induknya, baik dalam bentuk konsultasi maupun koordinasi.
- c. Kurangnya dukungan dari Induk  
 Kurangnya dukungan dari induk dapat menghalangi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Sehingga komunikasi dengan induk perlu diperhatikan dan harus terjalin dengan baik agar bisa memperoleh dukungan yang cukup dari induk dalam partisipasi politik.<sup>4</sup>  
 Sementara menurut Ramlan Surbakti, faktor yang menyebabkan seseorang untuk ikut serta dalam politik, antara lain:
  - a. Status sosial dan ekonomi.  
 Status sosial adalah kedudukan individu dalam masyarakat berdasarkan pada keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sementara itu, status ekonomi adalah kedudukan individu dalam stratifikasi masyarakat karena memiliki kekayaan dan harta benda. Individu yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang tinggi biasanya mempunyai pengetahuan, perhatian, dan minat terhadap politik.
  - b. Situasi politik  
 Situasi politik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kehadiran orang lain, keluarga, cuaca, kondisi ruang, ancaman, perilaku kelompok, serta perhatian pada politik.

---

<sup>4</sup> A Muslim, "Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (PILGUB) Jabar 2013." *Http, "Elib. Unikom. Ac. Id/Files/Disk1/639/Jbptunikompp-Gdl,2013,7,* <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf>.

- c. Afiliasi politik orang tua  
 Afiliasi adalah bergabung dengan suatu perkumpulan atau kelompok. Sementara itu, afiliasi politik diartikan sebagai keanggotaan atau bekerja sama dengan seseorang atau kelompok terkait dengan aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kedewasaan politiknya dengan bebas menjalankan kekuasaan politiknya dengan mengikuti berbagai aktivitas politik, seperti bergabung dalam parpol, melaksanakan dan mengambil kebijakan politik.
- d. Pengalaman berorganisasi  
 Organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan kehidupan bermasyarakat atau perilaku sosial yang diciptakan dengan memberikan suatu jabatan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas tertentu guna mencapai tujuan bersama.
- e. Kesadaran politik  
 Kesadaran seseorang terhadap lingkungan sosial politik, termasuk kesadarannya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berkaitan dengan kepedulian dan ketertarikannya terhadap lingkungan sosial politik di daerahnya.
- f. Kepercayaan terhadap pemerintah  
 Kepercayaan terhadap pemerintah mengacu pada penilaian seseorang terhadap pemerintah dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengambil kebijakan atau mengelola pemerintahan.
- g. Stimulan partisipasi melalui diskusi-diskusi informal dan sosialisasi dengan media massa.<sup>5</sup>  
 Peran media massa dalam sosialisasi pemilihan umum dinilai menjadi alasan penting mengapa masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Pemberian informasi pemilihan umum mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan pemilihan umum, tata cara pemungutan suara, dan informasi lainnya akan

---

<sup>5</sup> S Raden, I Kurnia, and R Massi, *Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Tengah)*, Cakrawala Jogjakarta, 2019, [https://perpustakaan.kpu.go.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/OTFkMWRjMwI3YzA5ZTc5NjM5OThkZDYyZTQ0YmQ2YzkwYWYxYTE4YQ==.pdf](https://perpustakaan.kpu.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OTFkMWRjMwI3YzA5ZTc5NjM5OThkZDYyZTQ0YmQ2YzkwYWYxYTE4YQ==.pdf).

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemilu dan mempengaruhi jumlah pemilih. Tidak kalah pentingnya dengan sosialisasi di media, diskusi-diskusi tentang pemilu juga mempunyai peranan yang penting dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemilu. Hal itu juga akan berdampak positif terhadap partisipasi pemilu.

### 3. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik dalam kajian ilmu politik terbagi menjadi empat jenis, antara lain:

#### a. Partisipasi politik dilihat berdasarkan tipologi

Berdasarkan tipologi, bentuk-bentuk partisipasi politik diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi aktif, merupakan partisipasi politik yang menitikberatkan pada proses masukan dan keluaran. Artinya setiap orang menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah serta mempunyai kesadaran politik. Partisipasi masyarakat mencakup kegiatan seperti kemampuan merumuskan kebijakan publik, mengusulkan alternatif kebijakan publik yang berbeda dari kebijakan pemerintah, memberikan kritik serta koreksi terhadap perbaikan kebijakan publik, memberikan suara dan memilih pemimpin pemerintahan.
- 2) Partisipasi pasif, merupakan partisipasi politik yang hanya terfokus pada proses keluaran, yaitu mengikuti perintah penguasa atau pemerintah, menerima serta menjalankan semua keputusan yang dibuat pemerintah.
- 3) Golongan putih (golput) atau golongan apatis, merupakan golongan yang menilai sistem politik saat ini telah melenceng dari apa yang mereka perjuangkan dan di harapkan.<sup>6</sup>

#### b. Partisipasi politik berdasarkan jumlah pelaku

Partisipasi politik dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku dibagi menjadi dua yakni partisipasi individual dan partisipasi kolektif.

---

<sup>6</sup> Salim, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)."

- 1) Partisipasi Individual, yaitu seseorang menulis surat kepada pemerintah yang berisi dengan tuntutan atau keluhan.
  - 2) Partisipasi Kolektif, mengacu pada tindakan atau kegiatan warga negara secara bersamaan mempengaruhi pemerintah misalnya kegiatan pemilu.<sup>7</sup>
- c. Bentuk partisipasi politik berdasarkan intensitasnya
- Menurut David. F. Roft dan Frank, partisipasi politik berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi tiga, yaitu partisipasi pengamat, partisipan, dan aktivis. Menilai kekuatan keterlibatan masyarakat dalam politik menciptakan piramida partisipasi politik.<sup>8</sup>

**Gambar 2.1. Piramida Partisipasi Politik**



- d. Bentuk partisipasi politik menurut ahli
- Sosiolog politik merumuskan berbagai bentuk partisipasi politik. Berikut adalah pemikiran para ahli mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik:
- 1) Michael Rush dan Philip Althoff
- Menurut Michael Rush dan Philip Althoff yang dikutip Damsar dalam Pengantar Sosiologi Politik, bentuk partisipasi politik diidentifikasi sebagai

<sup>7</sup> Lisa Retnasari, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pilbup Banyumas 2013 Di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas” (2013),26-27 [https://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB II.pdf](https://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.pdf).

<sup>8</sup> Trias Krisna Ruphi, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kelurahan Tamanarum Kabupaten Ponorogo Tahun 2015” (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017).

tipologi politik. Menurut Rush dan Althoff, tingkat partisipasi politik yang paling tinggi yaitu memegang suatu jabatan politik atau administratif. Sedangkan, tingkat partisipasi politik yang paling rendah yaitu orang apatis yang tidak terlibat dalam kegiatan politik sama sekali.<sup>9</sup>

2) Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson

Menurut Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi:

- a) Kegiatan pemilihan, termasuk dalam pemungutan suara, bekerja dalam pemilihan, berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, mencari dukungan untuk kandidat dan segala kegiatan yang berpengaruh pada hasil pemilihan.
- b) *Lobbying*, semua upaya individu dan kelompok untuk mempengaruhi keputusan politik mengenai isu-isu yang melibatkan banyak orang dengan cara menghubungi pejabat politik atau pejabat pemerintah.
- c) Aktivitas organisasi, melibatkan partisipasi anggota atau pejabat organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dewan.
- d) Pencarian koneksi adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu kepada pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk kepentingan dan keuntungan satu atau beberapa orang.
- e) Tindakan kekerasan adalah upaya melakukan kerusakan fisik pada seseorang atau harta benda, dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

3) Gabriel A. Almond

Menurut Gabriel A. Almond, terdapat dua bentuk partisipasi politik, antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rush, Althoff, Pengantar Sosiologi Politik dalam Pengantar Sosiologi Politik oleh Damsar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 185.

<sup>10</sup> Rush, Althoff, Pengantar Sosiologi Politik dalam Pengantar Sosiologi Politik oleh Damsar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 156

- a) Partisipasi politik konvensional, merupakan bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern.
- b) Partisipasi non konvensional, merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang biasanya tidak terjadi dalam kondisi normal dan bahkan dapat bersifat ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner.

Untuk lebih jelasnya, rincian kedua bentuk partisipasi politik menurut pandangan Gabriel A. Almond dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Partisipasi Konvensional dan Non Konvensional**

<b>Konvensional</b>	<b>Non Konvensional</b>
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Tindak kekerasan politik pada harta benda (pengrusakan, pengeboman, pembakaran)
	Tindakan kekerasan politik pada manusia (penculikan, pembunuhan) perang gerilya dan revolusi

#### 4. Fungsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik diartikan sebagai suatu kegiatan dan tindakan, baik individu ataupun kelompok yang mempunyai berbagai tujuan. Robert Lane mengidentifikasi empat fungsi partisipasi politik masyarakat, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yakni partisipasi politik seringkali terjadi dalam upaya

---

<sup>11</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 184.

mengubah arena politik untuk memperlancar aktivitas ekonomi atau sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan materi.

- b. Sarana untuk memenuhi kebutuhan adaptasi social, yakni pemenuhan kebutuhan akan harga diri, peningkatan status social dan rasa hormat karena dapat berhubungan dengan pejabat penting dan terkemuka.
- c. Sarana untuk mencapai nilai khusus, yakni masyarakat ikut serta dalam politik karena politik dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh tender dan proyek, serta memperlancar karier.
- d. Kesempatan untuk pemenuhan kebutuhan psikologis dan kebutuhan alam bawah sadar, yakni keikutsertaannya dalam dunia politik merupakan pemenuhan akan kebutuhan psikologis dan alam bawah sadar, misalnya: kepuasan batin, merasa terhormat karena dihargai orang lain dan menjadi orang penting, serta memperoleh kepuasan karena mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Arbi Sanit berpendapat bahwa partisipasi politik memiliki tiga tujuan, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Mendukung para penguasa, pemerintahan, dan sistem politik yang mereka ciptakan.
- b. Upaya untuk mengungkap kekurangan dan kelemahan pemerintah.
- c. Untuk menantang para penguasa yang bertujuan menggulingkannya, berharap melihat adanya perubahan struktural pada sistem politik dan pemerintahan melalui pemogokan, kerusuhan, dan kudeta.

Tidak hanya penting bagi masyarakat saja, partisipasi politik juga berperan penting bagi pemerintah. Bagi pemerintah, partisipasi politik mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Agus Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8 (2019): 7, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4805>.

<sup>13</sup> Muhammad Arif Nasution et al., "Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Langkat Tahun 2018," *JUPIIS*: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 347.

- a. Mendukung program pemerintah. Artinya, partisipasi masyarakat digunakan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah.
- b. Lembaga yang menyuarakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berkontribusi dalam pengarahannya dan meningkatkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. Memberikan gagasan, kritik dan saran kepada pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

## 5. Politik Menurut Islam

Islam merupakan agama yang komprehensif.<sup>14</sup> Menurut Sayyid Qutb, seperti yang diutarakan Dr. J Suyuthi bahwa Islam merupakan agama yang sempurna sebagai pedoman hidup, tidak hanya mencakup pedoman ibadah dan moral manusia tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan karakteristiknya, sistem sosial ekonomi, dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT. dalam surat An-Nahl [16]:89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ صَلَّٰ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ  
لِّلْمُسْلِمِينَ<sup>15</sup>

Dalam ayat ini tidak secara langsung menjelaskan bahwa Al-Qur'an mencakup sistem sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Tetapi apa yang dimaksud "Al-Qur'an sebagai penjelas dari segala sesuatu?". Sesungguhnya Al-Qur'an menegaskan bahwa ada dua kutub antara urusan duniawi dan akhirat, yang keduanya tidak bisa dipisahkan tetapi perlu diwujudkan bersama.

Dalam Islam, permasalahan yang berkaitan dengan politik lebih dikenal dengan istilah *Siyasah*. *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengendalikan, memerintah, mengarahkan, mengurus, dan mengatur. Sementara itu secara terminologi, *siyasah* yaitu memimpin atau mengatur sesuatu sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat. Hal ini, masalah hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik dalam Islam tergolong dalam *Fiqih Siyasah*. Secara

<sup>14</sup> Dr J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 1

<sup>15</sup> Surat An-Nahl [16]:89

etimologi, *Fiqih* berarti pemahaman dan pengertian terhadap perbuatan dan perkataan manusia. Sedangkan secara terminologi, *Fiqih* yaitu pengetahuan tentang hukum syariat islam yang beraitan dengan amal perbuatan manusia yang berdasarkan sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa *fiqih siyasa* merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dan pemerintahan serta segala kebijakan, peraturan, dan hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang sesuai dengan dasar-dasar syariah untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Keberadaan *ijtihad* dan metodenya penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Penyebabnya adalah: *pertama*, ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an serta Hadis sebagai penjelas dan penafsir yang berarti bahwa ayat-ayat hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits terbatas serta tidak dapat ditambahkan lagi. Meskipun dengan kemajuan zaman, selalu saja muncul permasalahan baru yang dihadapi masyarakat, *ijtihad* diperlukan untuk mencari ketetapan hukum yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>17</sup>

*Kedua*, sebagian besar ulama percaya bahwa peran kepemimpinan atau pemerintah adalah untuk melindungi agama dan mengatur urusan duniawi dengan menggunakan *ijtihad* dalam memenuhi peran tersebut. *Ketiga*, urusan pemerintahan dan negara tidak hanya berkembang secara dinamis, namun terkadang berbeda antara satu d dengan daerah yang lain. Hal tersebut tentu saja harus diputuskan dengan *ijtihad*.<sup>18</sup>

## 6. Pilkada

Pemilihan umum atau biasa disebut dengan “pemilu” adalah sarana rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, dewan rakyat, dan dewan rakyat daerah berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara

---

<sup>16</sup> Laelah Kodariah, “Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilukada Tahun 2011 Kota Yogyakarta” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII, 2007), 97.

<sup>18</sup> Mumamad Sholihin, “Perilaku Pemilih Buruh Rokok Dalam Pilkada Langsung Di Kabupaten Kudus,” 2009, 15.

langsung, umum, bebas, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan.<sup>19</sup> Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan untuk memilih pemimpin daerah, seperti walikota, bupati, dan gubernur.

Dalam menentukan walikota, bupati, dan gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan lima tahun sekali. Seperti dalam Bab IV Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa walikota, bupati, dan gubernur selaku kepala pemerintahan daerah di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dipilih secara demokratis. Hal ini berarti dalam menentukan gubernur, bupati dan walikota secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah.

Dalam penyelenggaraan pemilihan walikota, bupati, dan gubernur diselenggarakan secara demokratis. Seperti dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 disahkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota, dan gubernur dan wakil gubernur. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilkada serentak adalah pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah.<sup>20</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau temuan yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai bahan referensi untuk mendukung data. Salah satu data pendukung yang dibutuhkan oleh penulis yaitu hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berupa jurnal penelitian dan skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, seperti:

*Pertama*, Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dalam Meningkatkan Demokratisasi pada Pemilihan Walikota Makassar

---

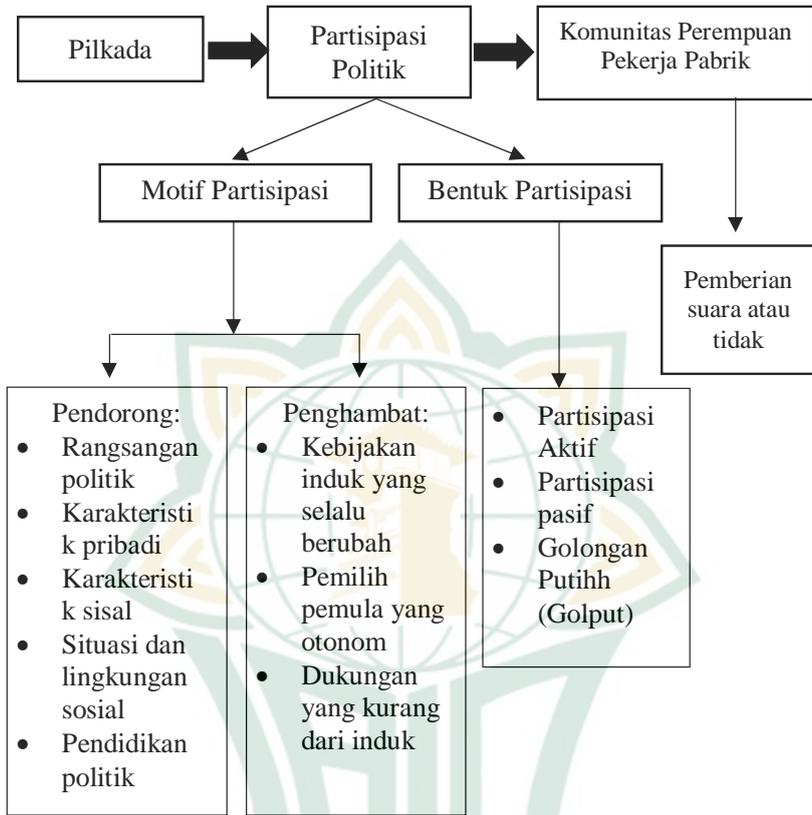
<sup>19</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017

<sup>20</sup> Mustikawati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara" (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).13.

2020. Peneliti Rezki Awalyah tahun 2022. Hasil penelitiannya berfokus pada partisipasi politik perempuan, partisipasi aktif, partisipasi pasif, serta faktor pendukung, dan faktor penghambat Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dalam Meningkatkan Demokratisasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. *Kedua*, Fenomena Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima Binaan Pemerintah Kota di Surabaya Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah 2015. Peneliti Ummul Faizah tahun 2017. Hasil penelitiannya berfokus pada motif serta bentuk-bentuk partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah 2015. *Ketiga*, Partisipasi Politik Siswa MAN II Yogyakarta dalam Pemilu Tahun 2011 Kota Yogyakarta. Peneliti Laelah Kodariah tahun 2012. Hasil penelitiannya berfokus pada pendeskripsian partisipasi politik siswa MAN II Yogyakarta dalam pemilu tahun 2011 kota Yogyakarta. *Keempat*, Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Penulis Mustikawati tahun 2021. Hasil penelitiannya berfokus pada Partisipasi Masyarakat dalam kampanye dan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Kelima*, Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017. Penulis Edi Supriono tahun 2018. Hasil penelitiannya berfokus pada mencari titik persoalan, tentang penyebab terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama di partisipasi politik. Selain itu juga sama-sama fokusnya ke pemilihan kepala daerah (pilkada), tetapi berbeda tingkatan kepala daerahnya. Pada penelitian ini berfokus pada pemilihan kepala daerah di tingkat bupati, sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada pemilihan kepala daerah di tingkat bupati, walikota, dan gubernur. Selain itu lokasi dan fokus penelitian antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu berbeda.

**C. Kerangka Berpikir**



Kerangka berpikir di atas untuk menjelaskan bahwa dengan terselenggaranya Pilkada 2017 di Kabupaten Jepara menyebabkan adanya partisipasi politik komunitas perempuan pekerja pabrik di Kecamatan Mayong. Partisipasi politik tersebut disebabkan karena adanya bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golput serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi. Sehingga dengan adanya dua hal tersebut menjadikan perilaku pemilih, apakah nantinya Pekerja Pabrik akan ikut berpartisipasi ataupun tidak dalam kegiatan Pemilu.